Article Info

Submitted: 18 Maret 2017 | **Reviewed:** 5 Mei 2017 | **Accepted:** 28 Juli 2017

**PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI MELALUI
INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT
OF INVESTMENT DISPUTE
(Studi Kasus Pemerintah Indonesia vs Churchill Mining)**

Aldo Rico Geraldi¹

Abstract

This research aims to determine International Centre For Settlement of Investment Dispute (ICSID), benefits and losses for Indonesia related with Choice of Option on Indonesian investment dispute settlement with Churchill Mining Plc in ICSID. This research uses normative legal research by gathering secondary data. Data collected is using the methods of literary study by collecting legal material and information in the form of legal materials of primary sources, secondary sources, and tertiary sources. In order to get a clear explanation, the data will arrange systematically and analyzed with descriptive methods. These results indicate that the disputes settlement between Indonesian Government against Churchill Mining through ICSID has several benefits, such as the confidentiality of the proceedings, the freedom to choose the arbitrator, the decision of the ICSID which are final and binding, and if the arbitration decision can be implemented in Indonesia it is necessary to obtain Exequatur of the Supreme Court. Although it has some benefits, however there are also some of the losses suffered by Indonesian Government, such as substantial costs to finance the proceedings at ICSID and if Indonesia was lost, it can cause financial loss with very large impact to country around trillions to pay compensation or indemnity.

Keywords: *benefits and losses; dispute settlement; ICSID*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai International Centre For Settlement of Investment Dispute (ICSID), keuntungan dan kerugian Indonesia terkait opsi pilihan penyelesaian sengketa investasi Indonesia dengan Churchill Mining Plc di ICSID. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode studi

¹Aldo Rico Geraldi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, Jalan Udayana No. 11 Singaraja, 81116, Bali, Indonesia, email: humas@undiksha.ac.id, Telp. (0362) 22570, Fax (0362) 25735.

kepastakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Dalam rangka mendapatkan pemaparan yang jelas, data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelesaian sengketa antara Pemerintah Indonesia dengan Churchill Mining melalui ICSID memiliki beberapa keuntungan, seperti kerahasiaan proses beracara, kebebasan untuk memilih arbiter, putusan dari ICSID yang bersifat final dan mengikat, serta apabila putusan arbitrase dapat dilaksanakan di Indonesia maka perlu memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung. Walaupun memiliki beberapa keuntungan, namun terdapat juga beberapa kerugian yang dialami oleh Pemerintah Indonesia, seperti biaya yang cukup besar untuk membiayai proses beracara di ICSID dan apabila Indonesia ternyata kalah, maka dapat menyebabkan kerugian terhadap negara yang sangat besar hingga triliunan untuk membayar kompensasi atau ganti rugi.

Kata Kunci : ICSID; keuntungan dan kerugian; penyelesaian sengketa

I. Pendahuluan

Churchill Mining yang merupakan perusahaan pertambangan di Indonesia, saat ini sedang menggugat Pemerintah Indonesia ke lembaga Arbitrase Internasional ICSID. Gugatan tersebut diajukan karena adanya pencabutan izin pertambangan Ridlatama Group oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada area sekitar 35 ribu hektare.² Perusahaan tambang ini mengakuisisi 75% perusahaan lokal bernama Ridlatama Group. Diperkirakan terdapat cadangan batu bara sebesar 2,73 miliar ton yang

berpotensi memberikan penghasilan perusahaan mencapai US\$700 juta-US\$1 miliar per tahun.³

Dicabutnya ijin kuasa pertambangan Ridlatama Group oleh Bupati Kutai Timur karena rekomendasi Pemerintah Pusat berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada September 2008 saat melakukan audit atas KP (Kuasa Pertambangan) yang dibuat tahun 2006-2008. Dengan hasil audit tersebut, BPK menemukan lima Kuasa Pertambangan palsu yang

² *Churchill vs Indonesia: Permintaan Perlindungan oleh Churchill Ditolak*, 24 Desember 2014, URL : <http://www.tambang.co.id/churchill-vs-indonesia-permintaan-perlindungan-oleh-churchill-ditolak-2516/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2017.

³ Susilo Bambang Yudhoyono. *Tak Gentar Hadapi Gugatan Churchill Mining*. Majalah BPK. Edisi 7 Juli 2012, hlm. 65. http://www.bpk.go.id/assets/files/magazine/edisi-07-volii-juli-2012_hal_62____80_.pdf, diakses pada tanggal 25 Februari 2017.

terbit pada tahun 2006-2008.⁴ Churchill Mining Plc juga belum mendapat izin dari Menteri Kehutanan untuk penambangan di kawasan hutan produksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

The International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) merupakan lembaga Arbitrase yang memiliki yurisdiksi terkait dengan setiap sengketa hukum yang timbul secara langsung dari penanaman modal antara negara anggota konvensi lainnya (investor). Pada tanggal 24 Februari 2014, ICSID menerbitkan putusan terkait yurisdiksi ICSID dalam memeriksa gugatan arbitrase Churchill Mining terhadap Pemerintah Indonesia.⁵ Dalam putusan tersebut, ICSID memutuskan bahwa memiliki kewenangan untuk memeriksa gugatan berdasarkan

interpretasi dari perjanjian *Bilateral Investment Treaty* (BIT)⁶ Indonesia dengan Inggris terkait dengan klausul forum penyelesaian sengketa. ICSID tidak sependapat dengan posisi Pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwa meskipun dalam BIT penyelesaian sengketa dilimpahkan kepada forum ICSID, namun pelimpahan ini tidak bersifat otomatis, melainkan harus melalui tahapan persetujuan tertulis dari Pemerintah Indonesia. Sebaliknya, lembaga Arbitrase ICSID cenderung menerima pendapat Churchill Mining bahwa pelimpahan tersebut bersifat otomatis.⁷

Putusan tersebut merupakan hasil sidang *hearing on jurisdiction* yang diselenggarakan di Singapura pada tanggal 13-14 Mei 2013.⁸

⁴ Antara News. *Indonesia siapkan data pendukung hadapi gugatan*. 15 Juni 2012. URL : <http://www.antaraneews.com/berita/316344/indonesia-siapkan-data-pendukung-hadapi-gugatan-churchill>, diakses pada tanggal 25 Februari 2017.

⁵ Rista Rama Dhany. *Digugat Churchill Rp 20 T. Pemerintah RI Percaya Diri Menang*, 26 Februari 2014, URL : <http://finance.detik.com/read/2014/02/26/183143/2509500/1034/digugat-churchill-rp-20-t-pemerintah-ri-percaya-diri-menang>, diakses pada tanggal 25 Februari 2017.

⁶ *Bilateral Investment Treaty* (BIT) adalah perjanjian yang menetapkan syarat dan kondisi terkait dengan investasi yang dilakukan oleh warga negara dan perusahaan di suatu negara dengan negara lainnya.

⁷ Wallstreet:Online. *Churchill Mining "Finale"*. 27 Februari 2014, URL: <http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1189817-131-140/churchill-mining-finale>, diakses pada tanggal 25 Februari 2017.

⁸ Gatra News. *JPN: Churchill Mining Belum Kalahkan Indonesia di Arbitrase*, 10 Maret 2014, URL : <http://www.gatra.com/hukum-1/48523-jpn-churchill-mining-belum->

Persidangan tersebut merupakan persidangan awal untuk memeriksa apakah ICSID memiliki kewenangan terhadap gugatan arbitrase yang diajukan oleh Churchill Mining terhadap Pemerintah Indonesia.

Terkait dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional tersebut, Pemerintah Indonesia tentunya perlu belajar dari beberapa kasus yang proses penyelesaian sengketanya dilakukan melalui lembaga Arbitrase dan Pengadilan Internasional. Sebagai contoh, ketika Indonesia dihadapkan di depan ICSID atas gugatan PT AMCO.⁹Dewan Arbitrase ICSID meminta Pemerintah Indonesia untuk membayar sejumlah USD 2.567.966,20 berikut bunga 6% atas sengketanya dengan Amco Asia Corp.¹⁰Terhadap putusan tersebut, Indonesia kembali memohon pembatalan untuk kedua kalinya pada tanggal 30 januari 1990. Majelis

Arbitrase *Ad Hoc* ICSID mengeluarkan putusannya pada tanggal 3 Desember 1992. Putusan Majelis Arbitrase *Ad Hoc* ICSID mendukung dan memperkuat putusan awal bahwa Pemerintah Indonesia harus membayar kerugian yang diderita oleh pihak AMCO sebesar 2,5 juta dolar US dan ditambah bunga 6% sejak putusan dijatuhkan.¹¹ Selain itu, Pemerintah Indonesia pernah beracara di *International Court of Justice* (ICJ) atas sengketa pulau Sipadan dan Ligitan dengan pihak Malaysia. Tahun 2002 ICJ memberikan keputusannya bahwa memberi hak kepada Malaysia untuk mengelola Sipadan dan Ligitan karena Malaysia telah menunjukkan bukti melakukan kegiatan pembangunan yang nyata di kedua pulau tersebut.¹²

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis mengangkat dua permasalahan yang meliputi:

kalahkan-indonesia-di-arbitrase.html, diakses pada tanggal 25 Februari 2017.

⁹ *Amco Asia Corporation and others v, Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/81/1)*. Lihat juga Sudargo Gautama. 1986. *Indonesia dan Arbitrase Internasional.*, Bandung: Alumni.

¹⁰ Ida Bagus Wyasa Putra. 2000. *Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 112.

¹¹ Sudargo Gautama. 1994. *Arbitrase Bank Dunia tentang Penanaman Modal di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia dalam Perkara Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, hlm. 5.

¹² Bambang Cipto. 2010. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 202.

1. Bagaimana pengaturan dan yurisdiksi ICSID terkait penyelesaian sengketa investasi?
2. Apa keuntungan dan kerugian bagi Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus investasi dengan Churchill Mining melalui ICSID?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji suatu aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin hukum yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu argumentasi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji latar belakang dari pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan memaparkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹³

¹³ Ronny Hanitijo. 1991. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke II, Jakarta: Ghalia Indo. hlm. 93.

III. Analisis dan Pembahasan

A. Pengaturan dan Yurisdiksi Konvensi Washington 1965 (*Convention on the Settlement of Investment Dispute Between States and National of Other States*)

Terbentuknya Konvensi Washington 1965¹⁴ adalah sebagai akibat dari situasi perekonomian dunia pada waktu beberapa negara berkembang yang melakukan tindakan sepihak terhadap investor-investor asing di dalam wilayahnya yang mengakibatkan konflik-konflik ekonomi yang dapat menimbulkan sengketa ekonomi berubah menjadi sengketa politik atau bahkan sengketa terbuka (perang). Tindakan-tindakan sepihak negara-negara berkembang ini adalah berupa nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik investor asing, propriasi dan tindakan-tindakan lainnya yang merugikan perusahaan asing.¹⁵

¹⁴ Konvensi Washington 1965 selanjutnya disebut Konvensi ICSID (*Convention on the Settlement of Investment Dispute Between States and National of Other States*).

¹⁵ Huala Adolf. 2002. *Arbitase Komersial Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 36.

Selain itu, latar belakang terbentuknya Konvensi ICSID dapat dilihat pada bagian pembukaan yang terdiri dari delapan paragraf. Perancang konvensi menyadari perlunya kerjasama internasional di bidang pembangunan ekonomi dan peran penanaman modal internasional. Kerjasama dan aktivitas penanaman modal tidaklah selalu berjalan lancar. Setiap saat dapat saja timbul sengketa di antara penanam modal (pihak swasta) dengan negara penerima modal.¹⁶ Terdapat dua tujuan utama dibentuknya Konvensi ICSID. Pertama, mengisi kekosongan upaya hukum di dalam menyelesaikan kasus-kasus penanaman modal yakni dengan memberikan suatu mekanisme khusus berupa fasilitas arbitrase atau konsiliasi. Kedua, mendorong dan melindungi arus modal dari negara maju kepada negara ketiga.¹⁷

Tujuan pertama konvensi ini terefleksi dari peranan *the Centre* ICSID. Wewenang badan ini khusus dan terbatas pada penanaman modal

yang salah satu pihaknya adalah negara penerima penanaman modal (*host state*). Pada saat sengketa muncul, *the Centre* akan membentuk suatu Panel Arbitrase atau Konsiliasi untuk menanganinya. Selanjutnya, peranan *the Centre* hanyalah mengawasi jalannya persidangan dengan memberikan aturan-aturan hukum acaranya.¹⁸ Sengketa dapat diselesaikan oleh lembaga pengadilan nasional, tetapi perancang konvensi menyadari pula bahwa lembaga pengadilan nasional dapat saja kurang sesuai untuk menyelesaikan sengketa antara suatu negara (apalagi negara penerima modal yang pengadilan nasionalnya menangani suatu sengketa) dengan penanam modal. Oleh karena itu, alternatif penyelesaian melalui metode atau mekanisme secara internasional, dalam hal ini arbitrase atau konsiliasi internasional dipandang lebih tepat.¹⁹

Dengan latar belakang tersebut, Bank Dunia berinisiatif untuk

¹⁶ Paragraf 1 dan 2 Pembukaan Konvensi ICSID (*Convention on the Settlement of Investment Dispute Between States and National of Other States*).

¹⁷ Huala Adolf. *op.cit.*, hlm. 37-38.

¹⁸ Joseph T. McLaughlin. 1979. "Arbitration and Developing Countries", *The International Lawyer*, 13 (2), hlm. 223.

¹⁹ Paragraf 3 Pembukaan Konvensi ICSID (*Convention on the Settlement of Investment Dispute Between States and National of Other States*).

membentuk badan arbitrase dan konsiliasi ICSID pada tahun 1961. Upaya merancang suatu konvensi akhirnya berhasil dan konvensi disahkan pada tahun 1965. Konvensi mulai berlaku apabila 20 negara telah meratifikasinya. Negara-negara yang meratifikasi antara lain yaitu Benin, Burkina Faso, Central African Republic, Chad, Republic of Congo, Cyprus, Cote D'ivoire, Gabon, Ghana, Iceland, Jamaica, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mauritania, Netherlands, Niger, Pakistan, Sierra Leone, Sweden, Tunisia, Uganda, United Kingdom of Great Britain, United States of America. Jumlah ratifikasi negara terpenuhi pada tahun 1966. Indonesia telah menandatangani Konvensi ICSID pada tanggal 16 Februari 1968 dan meratifikasi pada tanggal 28 September 1968. Selanjutnya Konvensi ICSID mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1968. Dengan diratifikasinya Konvensi ICSID oleh Indonesia, maka hal tersebut berimplikasi pada sengketa-sengketa penanaman modal yang melibatkan Indonesia dengan warga negara asing dapat diajukan

penyelesaiannya di lembaga Arbitrase ICSID. Dari pembukaan Konvensi ICSID, terdapat prinsip yang esensial untuk dapat terselenggaranya atau berfungsinya arbitrase atau konsiliasi. Paragraf 6 dan 7 pembukaan Konvensi ICSID menegaskan prinsip konsensus. Prinsip ini lahir dari kesepakatan para pihak, yaitu antara investor dengan negara penerima modal. Prinsip konsensus tetap disyaratkan meskipun negara penerima modal dan negara dari investor adalah negara anggota (peratifikasi atau penandatanganan atau penerima secara akses) Konvensi ICSID.²⁰

Konvensi ICSID terdiri dari 10 bab yang terbagi dalam 75 pasal. Konvensi dilengkapi dengan aturan-aturan formil dan aturan administratif.²¹ Bab I Konvensi ICSID

²⁰ Dapat dikatakan bahwa tindakan ratifikasi suatu negara tidak dengan otomatis mengikat negara atau investor untuk terikat pada konvensi ICSID.

²¹ Aturan-aturan formil dan aturan administratif yaitu *the International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) Regulations and Rules* yang dikeluarkan pada tahun 1967. Hasil revisi *ICSID Rules and Regulations* pada tahun 2003 terdiri dari :

1. *The Administrative Financial Regulations;*
2. *The Institution Rules;*
3. *The Arbitration Rules; and*

terdiri dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 24 mengatur mengenai pembentukan organisasi arbitrase yaitu pembentukan *the International Centre for the Settlement of Investment Disputes* (ICSID). Bagian ini mengatur juga mengenai tempat kedudukan, badan kelengkapan, dan lain sebagainya. Dalam Pasal 18 mengatur mengenai status, imunitas, dan hak-hak keistimewaan ICSID. ICSID memiliki personalitas hukum internasional penuh. ICSID memiliki kemampuan hukum untuk membuat kontrak, memiliki harta benda bergerak dan tidak bergerak, dan menyelenggarakan persidangan.²²

Bab II konvensi ICSID terdiri dari Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 mengatur mengenai yurisdiksi Badan Arbitrase ICSID. Yurisdiksi ICSID mencakup setiap sengketa hukum yang timbul secara langsung dari penanaman modal antara negara anggota konvensi lainnya (investor).²³

4. *The Conciliation Rules.*

²² Pasal 18 Konvensi ICSID (*Convention on the Settlement of Investment Dispute Between States and National of Other States*).

²³ Pasal 25 Konvensi ICSID (*Convention on the Settlement of Investment Dispute Between States and National of Other States*).

Konvensi tidak memberikan batasan tentang arti penanaman modal. Pasal 25 konvensi tidak membedakan antara arbitrase dan konsiliasi atau teknik penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal.²⁴ Meskipun ketentuan Pasal 25 tidak membedakan kedua cara tersebut, namun tetap berlaku prinsip kesepakatan dan pilihan cara penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak. Bab III konvensi terdiri dari Pasal 28 sampai dengan Pasal 35 mengatur mengenai Konsiliasi.²⁵ Penyelesaian sengketa melalui Konsiliasi ICSID tercakup pula dalam kewenangan ICSID.²⁶

²⁴ *United Nations Conference on Trade and Development*(UNCTAD), *ICSID:2.2. Selection Appropriate Forum*, New York: ICSID, 2003, hlm. 13.

²⁵ Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga.

²⁶ Dalam sengketa *SPP v Egypt* (1983), Majelis Arbitrase ICSID (*Convention on the Settlement of Investment Dispute Between States and National of Other States*) menegaskan arti pentingnya kesepakatan dan pilihan cara ini: "... consent to the Centre's jurisdiction must specify whether the consent is for purposes of arbitration or conciliation. Once consent has been given 'to the jurisdiction of the Centre', the Convention and its implementing regulations afford the means for making the choice between the two methods of dispute settlement. The Convention leaves that choice to the party instituting the proceedings". *SPP v Egypt, Decision on Jurisdiction* (1983); dalam; *United Nations Conference on Trade and*

Bab IV konvensi terdiri dari Pasal 36 sampai dengan Pasal 55 mengatur mengenai permohonan, komposisi, wewenang dan fungsi arbitrase serta putusan, pengakuan putusan arbitrase. Dalam badan Arbitrase ICSID, hakim harus menentukan kewenangannya dan Arbitrase ICSID harus memutus sengketa sesuai dengan aturan-aturan hukum yang disepakati oleh para pihak. Apabila tidak ada kesepakatan diantara para pihak, badan arbitrase ICSID harus menerapkan hukum dari negara peserta konvensi dan aturan-aturan hukum internasional yang dapat diterapkan. Bab V sampai dengan VII konvensi memuat aturan-aturan tambahan mengenai arbitrase. Aturan tambahan mencakup penggantian dan pendiskualifikasian arbitrator dan konsiliator, biaya persidangan, serta tempat persidangan. Konvensi memuat prinsip yang dikenal umum dalam arbitrase yaitu bahwa tempat diselenggarakannya persidangan arbitrase adalah tempat kedudukan

Development(UNCTAD),
ICSID:2.2.Selection Appropriate Forum,
New York:ICSID, 2003, hlm. 13.

ICSID yang berada di Washington.²⁷ Namun persidangan arbitrase dan konsiliasi dapat dilangsungkan ditempat lain, hanya dengan kesepakatan para pihak.²⁸

Bab VIII konvensi mengatur sengketa-sengketa antar negara peserta konvensi.²⁹ Seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) konvensi, badan arbitrase ICSID hanya akan menangani sengketa penanaman modal apabila para pihak adalah antara negara penerima modal (anggota konvensi) dan investor asing yang negaranya juga anggota konvensi. Bab ini menegaskan kemungkinan sengketa timbul bukan antara negara dengan investor tetapi antara negara dengan negara yang keduanya menjadi anggota konvensi.

²⁷ Pasal 62 Konvensi ICSID (*Convention on the Settlement of Investment Dispute Between States and National of Other States*).

²⁸ Pasal 63 Konvensi ICSID (*Convention on the Settlement of Investment Dispute Between States and National of Other States*). Ketentuan tersebut bertujuan untuk menghormati prinsip kesepakatan para pihak yang memiliki sifat fleksibilitas persidangan arbitrase, dan juga untuk menekan efektivitas persidangan dengan tidak harus terpaku pada suatu tempat persidangan.

²⁹ Pasal 64 Konvensi ICSID (*Convention on the Settlement of Investment Dispute Between States and National of Other States*).

Dalam hal ini, sengketa harus diselesaikan dengan negosiasi terlebih dahulu. Apabila negosiasi tidak berhasil, maka para pihak menyerahkannya kepada Mahkamah Internasional.³⁰Bab IX konvensi terdiri dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 66 mengatur mengenai amandemen terhadap konvensi. Bab X konvensi terdiri dari Pasal 67 sampai dengan Pasal 75 mengatur mengenai ketentuan akhir berupa ratifikasi serta kewajiban negara peratifikasi untuk menerapkan ketentuan-ketentuan konvensi ke dalam hukum nasional masing-masing negara secara efektif.³¹

Mengenai yurisdiksi ICSID, bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui ICSID hanya menyangkut sengketa hukum yang timbul akibat penanaman modal. ICSID tidak memiliki yurisdiksi terhadap penyelesaian sengketa yang terkait dengan kepentingan politik. ICSID baru memperoleh yurisdiksi

terhadap sengketa yang akan diselesaikan apabila telah ada persetujuan tertulis dari kedua belah pihak. Jika kedua belah pihak telah menyatakan persetujuannya, maka tidak ada pihak manapun yang dapat menarik diri secara sepihak dari penyelesaian sengketa ICSID.³²ICSID tidak menyelesaikan sengketa investasi secara langsung, melainkan menyerahkan melalui sarana Konsiliasi dan Dewan Arbitrase yang bertugas sesuai dengan ketentuan konvensi.

Ketentuan yang mengatur yurisdiksi badan arbitrase ICSID diatur didalam Pasal 25 Konvensi Washington 1965. Menurut pasal ini, setidaknya ada tiga persyaratan pokok yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk dapat menggunakan sarana arbitrase ICSID dalam menyelesaikan sengketa yang diberikan kepadanya.

Pertama, harus ada kata sepakat.³³ Para pihak sebelumnya

³⁰ Ketentuan dalam bab ini menegaskan para pihak dapat pula menempuh cara lainnya yang mereka sepakati.

³¹ Pasal 69 Konvensi ICSID (*Convention on the Settlement of Investment Dispute Between States and National of Other States*).

³² Pasal 25 ayat (1) ICSID (*Convention on the Settlement of Investment Dispute Between States and National of Other States*).

³³ Kata sepakat merupakan *corner stone* bagi yurisdiksi badan Arbitase ICSID. Lihat David A. Soley, 1985. "ICSID Implementation: An Effective Alternative to International Conflict", *International Lawyer*, 19 (2), hlm. 524.

harus mencapai kata sepakat bersama untuk menyerahkan sengketaanya kepada badan arbitrase ICSID. Di dalam hal ini, Konvensi mensyaratkan adanya suatu kata sepakat tertulis yang menunjuk pemakaian badan arbitrase ini dan tercantum dalam suatu klausula perjanjian penanaman modal yang menetapkan penyerahan suatu sengketa yang mungkin timbul dari perjanjian tersebut.³⁴ Namun, menurut Pasal 25 ayat (1) konvensi, kata sepakat untuk menyerahkan sengketa kepada badan ini tidak perlu dinyatakan di dalam suatu dokumen tersendiri.

Negara tuan rumah melalui perundang-undangan penanaman modalnya dapat menawarkan agar sengketa yang timbul dari adanya perjanjian penanaman modal dengan pihak asing diserahkan kepada badan arbitrase ICSID, dan pihak penanam modal dapat memberikan kata sepakat dengan menerima tawaran tersebut dengan tertulis. Disamping kata sepakat yang dilakukan oleh

kedua belah pihak, salah-satu pihakpun khususnya negara peserta Konvensi, berdasarkan Pasal 25 dapat memberitahukan kepada badan arbitrase ICSID sebelumnya tentang kewenangan badan ini terhadap kasus yang dihadapi negara tersebut. Baik pemberitahuan itu dilakukan pada waktu meratifikasi konvensi atau pada waktu kapanpun juga.

Kedua, yurisdiksi *ratione materiae*. Yurisdiksi badan arbitrase ICSID adalah terbatas pada sengketa-sengketa hukum sebagai akibat adanya penanaman modal. Istilah sengketa hukum ini dibedakan untuk memisahkan sengketa yang sifatnya ekonomis atau politis. Disamping itu, sengketa hak juga termasuk dalam yurisdiksi badan arbitrase ini. Namun, sengketa atau konflik kepentingan tidak termasuk ke dalamnya.

Ketiga, yurisdiksi *ratione personae*. Badan arbitrase ICSID hanya memiliki wewenang untuk mengadili sengketa-sengketa antara negara dengan warga negara asing lainnya yang negaranya juga adalah anggota/peserta Konvensi

³⁴ W. Michael Tupman, 1986. "Case Studies in the Jurisdiction of the International Centre for Settlement of Investment Disputes", *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 35, hlm. 814-815.

Washington.³⁵ Badan arbitrase ini tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa antara negara dengan negara, atau seorang warga negara dengan seorang warga negara lainnya meskipun sengketa yang diserahkan kepadanya itu adalah sengketa hukum yang timbul karena adanya perjanjian penanaman modal.

Di samping kata sepakat yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, salah satu pihakpun, khususnya negara peserta konvensidapat memberitahukan kepada badan arbitrase ICSID sebelumnya tentang kewenangan badan ini terhadap kasus yang dihadapi negara tersebut.³⁶ Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan pada waktu meratifikasi konvensi atau pada waktu kapanpun juga mengenai sengketa yang memiliki keterkaitan dengan penanaman modal yang dapat menjadi wewenang badan arbitrase.³⁷ Walaupun Konvensi ICSID hanya beranggotakan negara, bukan individu

atau perusahaan, namun sengketa antara negara dengan perseorangan atau perusahaan dapat diselesaikan melalui ICSID asalkan telah ada kesepakatan penunjukan tersebut. Sebaliknya, meskipun konvensi ini telah berlaku bagi suatu negara, namun tidak ada kewajiban bagi suatu negara untuk menyelesaikan sengketa investasi melalui Arbitrase ICSID, kecuali dengan persetujuan tertulis. Ratifikasi saja pada Konvensi ICSID tidak menyebabkan suatu negara peserta konvensi dapat menarik diri pada yurisdiksi ICSID.³⁸

Melalui ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan, ICSID merupakan lembaga terakhir dalam penyelesaian sengketa penanaman modal asing sekaligus merupakan upaya terakhir dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Dengan demikian, putusannya tidak bisa diadakan banding atau kasasi, tetapi masih dimungkinkan dengan jalan meminta atau memohon pembatalan putusan. Pengajuan alasan untuk memajukan gugatan kepada lembaga ICSID harus

³⁵ Huala Adolf, *op.cit.*, hlm. 90.

³⁶ Pasal 25 Konvensi ICSID (*Convention on the Settlement of Investment Dispute Between States and National of Other States*).

³⁷ Huala Adolf, *op.cit.*, hlm. 87.

³⁸ Rosyidah Rakhmawati. 2006. *Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global*. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 105.

dinyatakan secara tegas dalam gugatan yang diajukan. Bilamana diajukan dalam gugatan tersebut tidak jelas dan menjadi kabur, maka gugatan itu akan ditolak dan dinyatakan kabur sehingga gugatan dapat diajukan ulang. Oleh karenanya para pihak yang bersengketa baik dari pihak penanaman modal asing maupun pemerintah atau swasta perlu memperhatikan secara seksama, teliti dan berhati-hati dalam mengajukan gugatan agar tidak mengalami kegagalan dan mengakibatkan kerugian dari para pihak itu sendiri.³⁹

Pada saat timbul sengketa, para pihak yang sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui ICSID harus mengajukan permohonan kepada Sekretaris Jenderal ICSID. Permohonan ini didasari dengan perjanjian tertulis mengenai kesepakatan para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui ICSID. Didalam permohonan tersebut harus diuraikan juga masalah-masalah yang menjadi sengketa, identitas para pihak, komitmen bersama terhadap penyelesaian

sengketa yang dipilih serta hukum acara yang nantinya akan dipakai.

Permohonan ini kemudian diperiksa oleh Sekretaris Jenderal ICSID apakah sudah dapat diterima atau ditolak. Jika permohonan yang diajukan diterima, maka bagi permohonan penyelesaian sengketa melalui konsiliasi, dewan konsiliasi ICSID akan segera membentuk suatu komisi. Sedangkan terhadap permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang diterima, maka dewan arbitrase ICSID akan membentuk Mahkamah Arbitrase (*Arbitration Tribunal*).

Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan arbitrase dengan berdasar kepada adanya gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh para pihak yang merasa dirugikan dalam hubungan dengan penanaman modal asing, maka dewan akan memeriksa semua persyaratan yang diperlukan sehubungan dengan gugatan tersebut juga meneliti dan memeriksa apakah terdapat "*legal dispute*" atukah tidak. Bilamana semua syarat telah dipenuhi oleh dewan arbitrase ICSID, dibentuklah suatu dewan wasit yang

³⁹ Aminuddin Ilmar. 2004. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, hlm. 161.

yang terdiri atas 3 (tiga) orang wasit atau lebih arbitrator yang masing-masing ditunjuk oleh para pihak dengan ketentuan satu orang arbitrator dari negara yang netral. Sedangkan 2 (dua) orang atau lebih lainnya masing-masing mewakili pihak yang bersengketa. Dalam rangka penyelesaian sengketa oleh arbitrase telah ditetapkan pula bahwa hukum yang berlaku yang menjadi dasar pemakaian oleh dewan arbitrator dalam menyelesaikan sengketa tersebut adalah hukum yang dipilih oleh para pihak.⁴⁰

Yurisdiksi ICSID menunjuk kepada batas-batas berlakunya Konvensi Washington 1965 yang mendirikan Arbitrase ICSID agar badan ini dapat berfungsi dengan baik. Dengan kata lain, yurisdiksi ini menunjuk kepada batas-batas wewenang badan arbitrase ICSID didalam menyelesaikan sengketa yang diserahkan kepadanya. Pasal 41 ayat (1) Konvensi ICSID menetapkan bahwa Dewan Arbitrase ICSID adalah "Hakim" atas wewenang-wewenang

atau yurisdiksinya.⁴¹ Badan arbitrase internasional lainnya dalam hal menyangkut soal kompetensi juga menentukan dirinya sendiri sebagai badan atau pihak yang berwenang menentukan hal-hal apa saja yang menjadi kompetensinya.⁴²

B. Keuntungan dan Kerugian Indonesia Terkait Penyelesaian Sengketa Investasi dengan Churchill Mining di ICSID

ICSID menjadi salah satu lembaga arbitrase yang memiliki perbedaan dengan lembaga arbitrase lainnya. Hal tersebut dikarenakan ICSID merupakan suatu lembaga arbitrase internasional yang terkait dengan Bank Dunia. Keterkaitan tersebut membawa akibat penting bagi ICSID terutama terkait dengan tujuan utama ICSID dalam meningkatkan sikap saling percaya

⁴⁰Pasal 42 ayat (1) ICSID (*Convention on the Settlement of Investment Dispute Between States and National of Other States*).

⁴¹*The Tribunal shall be the judge of its own competence.* Ketentuan ini dapat diartikan sebagai kewenangan untuk menetapkan apakah persyaratan-persyaratan suatu sengketa yang diserahkan kepadanya itu telah memenuhi persyaratan konvensi dan apakah sengketa yang diserahkananya itu berada di dalam kewenangannya.

⁴² Lihat Pasal 16 ayat (1) *The UNCITRAL Rules and Model Law (the Arbitration Rules)*. Lihat juga Pasal 8 *Rules of the ICC Court of Arbitration*.

dan menguntungkan antara negara dengan investor agar dapat meningkatkan arus sumber kekayaan kepada negara terkait berdasarkan syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu, ICSID tidak dapat dipandang semata-mata sebagai suatu mekanisme penyelesaian sengketa, namun juga sebagai lembaga yang dapat meningkatkan perkembangan ekonomi negara. Akibat lain dari adanya keterkaitan antara ICSID dan Bank Dunia yaitu bahwa biaya yang digunakan untuk beracara di lembaga Arbitrase tersebut menjadi lebih murah karena Bank Dunia memberikan subsidi kepada ICSID. Penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Churchill Mining melalui arbitrase internasional yaitu ICSID memiliki beberapa keuntungan dan kerugian bagi Pemerintah Indonesia. Keuntungan bagi Pemerintah Indonesia antara lain:

1. Kerahasiaan.

Prinsip kerahasiaan yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan Churchill Mining melalui arbitrase ICSID tidak sama seperti praktek di pengadilan yang pada prinsipnya

terbuka untuk umum. Hal ini tentunya akan memberikan keuntungan tersendiri bagi Pemerintah Indonesia karena ditujukan agar integritas pemerintah Indonesia tetap terjaga. Dengan terjaganya integritas para pihak, khususnya pemerintah Indonesia, diharapkan prospek pemerintah dalam menerima investor atau pengusaha asing tetap terjaga, sehingga para investor asing masih dapat menjalankan usahanya dengan baik di Indonesia. Selain itu, tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan keputusan arbitrase sebagaimana halnya yang terjadi pada pengadilan nasional biasa. Dengan adanya kerahasiaan ini, nama baik para pihak terutama Pemerintah Indonesia tetap terlindungi baik di kalangan masyarakat maupun para pihak asing yang ingin menanamkan sahamnya di Indonesia.

Sebagai perbandingan, prinsip kerahasiaan ini apabila ditinjau dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, salah satunya dapat dilihat didalam penjelasan umum paragraf empat yang menyebutkan bahwa

penyelesaian sengketa melalui arbitrase akan menjamin kerahasiaan para pihak. Hal yang sama juga dapat dilihat dari isi Pasal 27 bahwa semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.

2. Proses Cepat.

Penyelesaian sengketa secara cepat tentunya merupakan harapan bagi semua pihak yang mengalami suatu perkara, terutama bagi pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu, proses arbitrase ICSID dibuat sesederhana mungkin oleh para pihak. Hal tersebut tentunya berbeda dengan beracara di pengadilan yang memerlukan waktu cukup lama dalam proses penyelesaiannya. Hakim yang mengadili tidak hanya berhadapan dengan satu atau dua perkara saja pada waktu yang bersamaan. Dalam prakteknya, ia dihadapkan lebih dari dua-tiga perkara dalam suatu masa tugasnya. Akibatnya hakim harus membagi-bagikan prioritas dan waktu untuk perkara-perkara mana yang didahulukan dan mana yang tidak terlalu mendesak. Hal ini tentu dipengaruhi pula oleh faktor-faktor lain yang mendukung cepat-tidaknya

proses penyelesaian sesuatu perkara. Dengan proses yang cepat dalam beracara di ICSID untuk menyelesaikan sengketa Pemerintah Indonesia dengan Churchill Mining, Pemerintah Indonesia tentunya tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membiayai proses penyelesaian sengketa tersebut di ICSID.

3. Kebebasan Memilih Arbiter.

Kebebasan memilih arbiter merupakan keuntungan bagi Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia dapat memilih arbiter yang sangat berkompeten dalam menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapinya dengan Cruchill Mining agar Pemerintah Indonesia dapat memenangi gugatan tersebut. Dalam arbitrase, pemilihan arbiter pada prinsipnya diserahkan kepada para pihak yang didasarkan pada kesepakatan mereka. Namun, apabila diantara para pihak tidak menemukan kesepakatannya tentang ini, maka atas permohonan para pihak dapat meminta pengadilan untuk memilih dan mengangkat seorang arbiter. Begitu juga sebaliknya, apabila salah satu pihak tidak setuju

atas seorang arbiter yang telah diangkat, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan keberatannya pada pengadilan.⁴³

Diberikannya kebebasan bagi para pihak untuk memilih sendiri arbiternya sudah barang tentu sangat menguntungkan pemerintah Indonesia. Dengan perkataan lain, adanya kebebasan dalam memilih arbiter ini memungkinkan pemerintah Indonesia untuk menemukan orang yang tepat untuk menyelesaikan sengketa dengan Churchill Mining. Kearifan dalam memilih arbiter ini jelas berdampak pada obyektifitas dan kualitas putusan.

Pemerintah Indonesia dapat memilih arbiter yang dianggap dapat memenuhi harapan pemerintah baik dari segi keahlian atau pengetahuannya pada sesuatu bidang tertentu. Disini arbiter yang dipilih untuk menangani perkara atau sengketa yang sedang dihadapi oleh Pemerintah dengan Churchill Mining tidak harus selalu sarjana atau ahli hukum.

⁴³ Lihat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Arbiter atau arbitrator ICSID bisa tunggal atau lebih sebagaimana disetujui oleh para pihak. Apabila para pihak tidak sepakat terhadap jumlah dan cara pengangkatan arbiter, Dewan arbiter terdiri dari tiga orang. Dimana masing-masing pihak mengangkat satu orang, dan kedua orang arbiter yang diangkat oleh para pihak tersebut, mengangkat satu orang arbiter lain yang sekaligus menjadi ketua arbitrase. Pengangkatan mana didasarkan pada kesepakatan para pihak.

4. Putusan Arbitrase Bersifat Final dan Mengikat.

Putusan arbitrase ICSID yang bersifat *final* dan *binding* memberikan keuntungan bagi Pemerintah Indonesia. Final diartikan bahwa terhadap putusan arbitrase ICSID tertutup untuk melakukan upaya hukum baik banding ke Pengadilan Tinggi ataupun kasasi ke Mahkamah Agung.⁴⁴ Sifat putusannya

⁴⁴ Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) juga bersifat final dan binding. Oleh sebab itu, menurut BANI para pihak terikat pada putusan tersebut. Dengan perkataan lain, tindakan para pihak yang bertentangan dengan putusan BANI dianggap sebagai pelanggaran. *Pendapat Yang Mengikat & Klausula Arbitrase*, URL : <http://www.bani->

yang *final* dan *binding* ini lebih memungkinkan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase ICSID secara cepat. Sifat putusan ini berbeda dengan putusan pengadilan. Dengan kata lain, suatu putusan pengadilan dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Hal ini merupakan salah satu yang menyebabkan proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase ICSID cenderung lebih cepat daripada berperkara melalui lembaga pengadilan.⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa antara Pemerintah Indonesia dengan Churchill Mining di Arbitrase ICSID juga menganut prinsip *final* dan *binding* terhadap putusan yang dikeluarkannya. Hal tersebut terlihat jelas dari kata *the award shall be binding* sebagaimana terdapat dalam artikel tersebut. Sifat *final* dan *binding* yang dimiliki oleh putusan arbitrase ICSID ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah pelaksanaan dari

putusan, sehingga dengan demikian dapat menguntungkan para pihak terutama Pemerintah Indonesia baik dari segi waktu maupun secara finansial.

Begitu juga dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat.⁴⁶ Prinsip ini kemudian dikuatkan kembali oleh pasal 60 undang-undang yang sama.⁴⁷

5. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional ICSID.

Pengakuan dan pelaksanaan terhadap putusan arbitrase internasional ICSID dalam menyelesaikan sengketa antara Pemerintah Indonesia dan Churchill Mining terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang

arb.org/bani_pendapat_ind.htm, diakses pada tanggal 25 Februari 2017.

⁴⁵ Soebagjo dan Fatmah Jatim. 1995. *Arbitrase di Indonesia*. Cet ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 19-21.

⁴⁶ Lihat Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

⁴⁷ Lihat Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat *final* dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

lingkup hukum perdagangan, putusan yang tidak bertentangan dengan ketertibann umum, putusan yang telah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusan yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁴⁸

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa putusan arbitrase sifatnya final, namun jika dengan putusan tersebut Pemerintah Indonesia merasa dirugikan, pemerintah masih dapat mengajukan pembatalan atas putusan tersebut.

Penyelesaian sengketa yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia di ICSID, selain memiliki keuntungan yang diperoleh oleh Pemerintah Indonesia terkait penyelesaian sengketa dengan Churchill Mining, terdapat juga

beberapa kerugian yang dialami oleh Pemerintah Indonesia, antara lain:

- 1) Biaya beracara yang cukup besar seperti biaya persidangan, mulai dari biaya administrasi dan biaya rata-rata Majelis Arbitrase, proses dari persiapan sampai klaim putusan akhir, biaya untuk para ahli, saksi, manajemen dan biaya eksternal, serta biaya pengacara yang cukup besar untuk pengacara asing dari kantor hukum besar di luar negeri dan biaya tim pengacara dalam negeri, serta biaya transportasi yang jumlahnya tidak sedikit.
- 2) Churchill mining menuntut Pemerintah Indonesia di ICSID dengan nilai yang sangat tinggi, sehingga apabila Indonesia ternyata kalah melawan Churchill Mining pada arbitrase Internasional ICSID, hal ini dapat menyebabkan kerugian terhadap negara yang sangat besar. Negara

⁴⁸ Lihat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

akan kehilangan uang triliunan rupiah sebagai kompensasi dan biaya-biaya lainnya selama proses beracara di arbitrase ICSID.

- 3) Apabila Pemerintah Indonesia kalah melawan Churchill Mining di arbitrase internasional ICSID, maka hal ini akan sangat merepotkan dan mempengaruhi Pemerintah Republik Indonesia, karena putusan dari arbitrase internasional berlaku secara internasional, sehingga dengan putusan yang dibuat oleh ICSID ini apabila Indonesia dinyatakan kalah maka Churchill Mining melalui arbitrase internasional dapat menyita kekayaan yang dimiliki Republik Indonesia dan pemerintah juga akan kehilangan kepercayaan dari para investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia sehingga akan

mempengaruhi iklim investasi Indonesia.

Berdasarkan keuntungan dan kerugian yang telah dipaparkan tersebut, maka Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam proses beracara di ICSID. Bukti-bukti yang menguatkan pihak Pemerintah Indonesia terkait dengan kasus ini perlu dipersiapkan agar pemerintah bisa memenangkan sengketa yang sedang dihadapinya dengan pihak Churchill Mining. Pemerintah Indonesia sebaiknya juga belajar dari kasus-kasus sebelumnya yang sengketanya diselesaikan melalui lembaga Arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase cenderung memiliki dampak yang kurang baik bagi Pemerintah Indonesia seperti biaya yang cukup besar dan jikalau Pemerintah Indonesia mengalami kekalahan, maka Pemerintah Indonesia harus membayar semua tuntutan yang diberikan oleh pihak Churchill Mining dan hal tersebut sangat merugikan keuangan negara. Terkait dengan sengketa penanaman modal yang mungkin kembali terjadi di Indonesia, sebaiknya sengketa

tersebut dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar tidak merugikan keuangan negara yang cukup besar untuk beracara di lembaga Arbitrase.

IV. Penutup

Konvensi ICSID terdiri dari 10 bab yang terbagi dalam 75 pasal. Konvensi dilengkapi dengan aturan-aturan formil dan aturan administratif. Terbentuknya Konvensi Washington 1965 adalah sebagai akibat dari situasi perekonomian dunia pada waktu beberapa negara berkembang yang melakukan tindakan sepihak terhadap investor-investor asing di dalam wilayahnya. Mengenai yurisdiksi ICSID, bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui ICSID hanya menyangkut sengketa hukum yang timbul akibat penanaman modal. ICSID baru memperoleh yurisdiksi terhadap sengketa yang akan diselesaikan apabila telah ada persetujuan tertulis dari kedua belah pihak. Jika kedua belah pihak telah menyatakan persetujuannya, maka tidak ada pihak manapun yang dapat

menarik diri secara sepihak dari penyelesaian sengketa ICSID.

Selanjutnya, penyelesaian sengketa antara Pemerintah Indonesia dengan Churchill Mining melalui ICSID memiliki beberapa keuntungan, seperti kerahasiaan dalam proses beracara, jangka waktu yang relatif cepat, kebebasan untuk memilih arbiter, putusan ICSID yang bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada upaya banding dan para pihak harus melaksanakan putusan tersebut. Namun diantara beberapa keuntungan yang diperoleh oleh Pemerintah Indonesia, terdapat juga beberapa kerugian yang dialami oleh pemerintah, seperti biaya yang cukup besar untuk membiayai proses beracara di ICSID, kuasa hukum dan lain sebagainya yang dibutuhkan. Selain itu, apabila Indonesia ternyata kalah maka dapat menyebabkan kerugian terhadap negara yang sangat besar hingga triliunan untuk membayar kompensasi atau ganti rugi. Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan bukti-bukti yang menguatkan, memilih arbiter yang berkompeten, meminta pendapat dari para ahli hukum yang memahami

sengketa mengenai penanaman modal melalui ICSID agar Pemerintah Indonesia dapat memenangkan kasus yang sedang dihadapinya dengan pihak Churchill Mining.

Bibliografi

Buku:

- Adolf, Huala. 2002. *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Cipto, Bambang. 2010. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gautama, Sudargo. 1986. *Indonesia dan Arbitrase Internasional*. Bandung: Alumni.
- _____. 1987. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jilid III. Bagian 2. Buku ke-8. Bandung: Alumni.
- _____. 1994, *Arbitrase Bank Dunia tentang Penanaman Modal di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia dalam Perkara Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. 1994. *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*. Bandung: Alumni.
- Hanitijo, Ronny. 1991. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. ke II. Jakarta: Ghalia Indo.
- Ilmar, Aminuddin. 2004. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Iskandar, Jawahir Tantowi dan Pranoto. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Istanto, Sugeng. 2007. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV Ganda.
- Jatim, Soebagjo dan Fatmah. 1995. *Arbitrase di Indonesia*. Cet ke-1. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Putra, Ida Bagus Wyasa. 2000. *Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Rakhmawati, Rosyidah. 2006. *Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Sembiring, Sentosa. 2007. *Hukum Investasi*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Suwardi, Sri Setianingsih. *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Starke, J.G. 2007. *Pengantar Hukum Internasional 2*. Jakarta: Sinar Grafika.

Winarta, Frans Hendra. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Walter R, Thomas.1980. *Pacific Blokade, A Lost Opportunity of the 1930's*, dalam US Naval War College International Law Studies.

Jurnal:

David A. Soley, 1985, "ICSID Implementation: An Effective Alternative to International Conflict", *The International Lawyer*, 19 (2).

Joseph TMcLaughlin, 1979, "Arbitration and Developing Countries", *The International Lawyer*, 13 (2).

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, 2013, "Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Melalui Arbitrase Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan Churchill Mining Oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Kutai Timur)", *Jurnal Hukum Ekonomi*, 1(2).

W. Michael Tupman. 1986. "Case Studies in the Jurisdiction of the International Centre for Settlement of Investment Disputes", *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 35.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dengan Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1968) .

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Kasus Hukum:

Amco Asia Corporation and others v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/81/1).

Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia) Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 625.

Instrumen Hukum Internasional:

Konvensi Washington 1965 tentang ICSID (*Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and National of Other States*) United Nations-Treaty Series, No. 8359.

1976 Agreement between the Government of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and The

Government of The Republic of Indonesia for The Promotion and Protection of Investments.

Internet:

Antara News, *Indonesia siapkan data pendukung hadapi gugatan*, <http://www.antarane.ws.com/berita/316344/indonesia-siapkan-data-pendukung-hadapi-gugatan-churchill>, diakses pada tanggal 25 Februari 2017.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), *Pendapat Yang Mengikat & Klausula Arbitrase*, http://www.bani-arb.org/bani_pendapat_ind.htm, diakses pada tanggal 25 Februari 2017.

Churchill vs Indonesia: Permintaan Perlindungan oleh Churchill Ditolak, <http://www.tambang.co.id/churchill-vs-indonesia-permintaan-perlindungan-oleh-churchill-ditolak-2516/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2017.

Gatra News, *JPN: Churchill Mining Belum Kalahkan Indonesia di Arbitrase*, <http://www.gatra.com/hukum->

1/48523-jpn-churchill-mining-belum-kalahkan-indonesia-di-arbitrase.html, diakses pada tanggal 25 Februari 2017.

magazine/edisi-07-volii-juli-2012_hal_62____80_.pdf., diakses pada tanggal 25 Februari 2017.

Rista Rama Dhany, *Digugat Churchill Rp 20 T, Pemerintah RI Percaya Diri Menang*, <http://finance.detik.com/read/2014/02/26/183143/2509500/1034/digugat-churchill-rp-20-t-pemerintah-ri-percaya-diri-menang>, diakses pada tanggal 25 Februari 2017.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), ICSID:2.2. Selection Appropriate Forum, New York: ICSID, 2003. http://unctad.org/en/docs/edmmisc232overview_en.pdf, diakses pada tanggal 25 Februari 2017.

Wallstreet Online, *Churchill Mining "Finale"*, <http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1189817-131-140/churchill-mining-finale>, diakses pada tanggal 25 Februari 2017.

Yudhoyono, Susilo Bambang, *Tak Gentar Hadapi Gugatan Churchill Mining*, Majalah BPK, Edisi 7 Juli 2012, <http://www.bpk.go.id/assets/files/>